



UNIVERSITAS INDONESIA

**TINJAUAN YURIDIS ATAS PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP INDUSTRI DALAM NEGERI MELALUI
PERATURAN NASIONAL DIKAITKAN DENGAN UPAYA
SAFEGUARDS DALAM *WORLD TRADE ORGANIZATION*
(WTO)**

T E S I S

SYLVIANA KUSUMA LESTARI

NPM 0806478475

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
JAKARTA
JUNI 2010**



UNIVERSITAS INDONESIA

**TINJAUAN YURIDIS ATAS PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP INDUSTRI DALAM NEGERI MELALUI
PERATURAN NASIONAL DIKAITKAN DENGAN UPAYA
SAFEGUARDS DALAM *WORLD TRADE ORGANIZATION*
(WTO)**

T E S I S

**DIAJUKAN SEBAGAI SALAH SATU SYARAT
UNTUK MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM (M.H.)
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA**

SYLVIANA KUSUMA LESTARI

NPM 0806478475

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
KEKHUSUSAN HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL
JAKARTA
JUNI 2010**

ABSTRAK

Nama : Sylviana Kusuma Lestari
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Judul Tesis : Tinjauan Yuridis Atas Perlindungan Hukum Terhadap Industri Dalam Negeri Melalui Peraturan Nasional Dikaitkan Dengan Upaya *Safeguards* Dalam *World Trade Organization* (WTO)

Tesis ini membahas tentang perlindungan industri dalam negeri terhadap adanya lonjakan impor dengan penerapan tindakan pengamanan (*safeguards measures*) melalui peraturan nasional dan membandingkan kesesuaian peraturan nasional mengenai *safeguards* tersebut dengan *WTO Agreement*, baik dalam *GATT 1947* maupun *Agreement on Safeguards*. Tindakan pengamanan (*safeguards measures*) berbeda dari tindakan *anti dumping* dan *countervailing measures* karena *safeguards* diterapkan dalam suasana perdagangan yang adil (*fair trade*). WTO memperbolehkan negara Anggota yang industrinya mengalami kerugian serius atau ancaman kerugian serius sebagai akibat adanya lonjakan impor untuk melakukan tindakan *safeguards*, baik berupa pengenaan tarif tambahan, pembatasan impor (kuota) maupun keduanya. Tindakan pengamanan ini dipandang kurang populer dan jarang digunakan karena syaratnya yang cukup berat. Pemerintah negara Anggota WTO cenderung memilih untuk melindungi industri dalam negeri mereka melalui “*grey area measures*” dengan cara menggunakan perundingan bilateral di luar tata cara *GATT*, mereka meminta negara pengekspor untuk mengurangi jumlah eksportnya secara sukarela (*voluntary export restraints-VER*) atau melalui persetujuan yang saling menguntungkan untuk menyetujui cara lain untuk berbagi pasar (*orderly marketing arrangement-OMA*). Tesis ini menggunakan penelitian yuridis normatif karena menitikberatkan pada penelitian kepustakaan yang intinya meneliti asas-asas hukum, sistematis hukum, dan sinkronisasi hukum dengan cara menganalisisnya. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Selanjutnya, permasalahan yang dibahas dalam Tesis ini adalah mengenai kesesuaian pengaturan *safeguards* dalam WTO dibandingkan dengan peraturan nasional dan mengenai penerapan tindakan pengamanan (*safeguards measure*) apakah telah dapat melindungi industri dalam negeri dari lonjakan impor atau belum.

Kata Kunci: *Safeguards*, Industri Dalam Negeri, Impor

ABSTRACT

Name : Sylviana Kusuma Lestari
Study Program : Master's Degree of Law
Title : Judicial Review Law On Protection Against Domestic Industry Through National Regulations Related With Efforts to Safeguard on the World Trade Organization (WTO)

This thesis discusses the protection of domestic industry against the import surge to the implementation of safeguards measures through national legislation and to compare the suitability of national regulations regarding such safeguards with the WTO Agreement, either in GATT 1947 and the Agreement on Safeguards. Safeguard measures differ from anti-dumping measures and countervailing measures as safeguards applied in an atmosphere of fair trade. Members of the WTO allow countries that the industry experienced serious injury or threat of serious injury as a result of increased import to take safeguards action, whether in the form of the imposition of additional tariffs, import restrictions (quotas) or both. Safeguard measures are seen as less popular and rarely used because the conditions are quite heavy. WTO member country governments tend to choose to protect their domestic industries through the "gray area measures" by using bilateral negotiations outside GATT procedures, they require exporting countries to reduce the amount of its exports voluntarily (voluntary export restraints-VER) or through agreements mutually beneficial to agree on other ways to market share (orderly marketing arrangements-OMA). This thesis uses normative legal research because it focuses on the research literature that examines the core principles of law, the law systematically, and the synchronization of the law in a way it analyzed. The data obtained were analyzed using qualitative descriptive methods. Furthermore, the problems will be discussed in this thesis is about the suitability of setting safeguards in the WTO as compared with the national regulations and on implementation safeguards measure whether it has been able to protect domestic industries from import surge or not.

Key Words: Safeguards, Domestic Industry, Import

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	vi
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	9
1.3. Tujuan Penelitian.....	9
1.4. Manfaat Penelitian.....	9
1.5. Kerangka Teori.....	10
1.6. Kerangka Konseptual.....	13
1.7. Metodologi Penelitian.....	15
1.8. Sistematika Penelitian.....	18
BAB II TINJAUAN UMUM WORLD TRADE ORGANIZATION (WTO)	
2.1 GATT.....	19
2.1.1 GATT Secara Umum.....	19
2.1.2 GATT Sebagai Perjanjian Internasional.....	23
2.1.3 GATT Sebagai Organisasi Internasional.....	26
2.1.4 GATT Sebagai Forum Penyelesaian Sengketa.....	27
2.2 Putaran Perundingan Perdagangan.....	30
2.3 WTO.....	40
2.3.1 Prinsip-Prinsip Hukum Sistem Perdagangan	

	Internasional.....	40
	2.3.2 Perbedaan WTO dengan GATT.....	43
	2.3.3 Perundingan dan Perjanjian di Bidang <i>Safeguards</i>	45
BAB III SAFEGUARDS DALAM WTO DAN HUKUM NASIONAL		
	3.1 Ketentuan <i>safeguards</i> dalam WTO.....	50
	3.1.1 <i>Safeguards</i> dalam GATT 1947.....	50
	3.1.2 <i>Safeguards</i> dalam <i>Agreement on Safeguards</i>	54
	3.2 Hukum Nasional.....	65
	3.2.1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.....	65
	3.2.2 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2002 Tentang Tindakan Pengamanan Industri Dalam Negeri Dari Akibat Lonjakan Impor.....	69
	3.2.3 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 84/MPP/Kep/2/2003 tentang Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia...	75
BAB IV PERLINDUNGAN TERHADAP INDUSTRI DALAM NEGERI		
	4.1 Mekanisme WTO.....	79
	4.1.1 Perlakuan Khusus Bagi Negara Berkembang.....	79
	4.1.2 <i>Generalized System Preferences</i> (GSP)	86
	4.1.3 Perlindungan Bagi <i>Infant Industry</i>	89
	4.2 Pengaruh WTO terhadap Kebijakan Perdagangan Indonesia...	92
	4.3 Penerapan Tindakan <i>Safeguards</i>	94
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN		
	5.1 Kesimpulan.....	105
	5.2 Saran.....	106
DAFTAR PUSTAKA.....		107